

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan lembaga yang mengatur pasar modal Indonesia, yang menyediakan sarana untuk kegiatan jual beli efek perusahaan-perusahaan go public yang ada di Indonesia. Pada 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan sub sektor berdasarkan jenis kegiatan usahanya diantaranya adalah sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti & real estate, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi & logistik, dan sektor produk investasi baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau milik swasta.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu badan yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian BUMN bertujuan untuk memperoleh keuntungan, memberikan kontribusi pada perekonomian nasional, menambah penerimaan negara, dan sebagai penyedia produk dan jasa yang berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, BUMN di Indonesia terbagi menjadi 2 bentuk yaitu Perusahaan Korporasi (Persero) dan Perusahaan Publik (Perum). Perusahaan Korporasi (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikan modalnya dibagi paling sedikit 51% jumlah sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan Publik (Perum) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara.

Badan Usaha Milik negara merupakan salah satu kontributor dalam perekonomian nasional yang memegang peran penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan negara sesuai dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut Kementerian Badan Usaha Milik Negara jumlah perusahaan BUMN di Indonesia pada tahun 2021 terdiri dari 109 perusahaan yang terbagi dalam beragam sektor usaha diantaranya adalah sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perikanan, transportasi, telekomunikasi, konstruksi, keuangan, dan sektor lainnya. Salah satu bentuk kontribusi BUMN dalam meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan berpartisipasi di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Perusahaan BUMN yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public* sampai tahun 2021 berjumlah 20 emiten.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor:PER8/MBU/08/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024, menjelaskan bahwa BUMN secara konsisten berkontribusi lebih dari 16% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sejak tahun 2018. Menteri Badan Usaha Milik Negara mengatakan bahwa BUMN berperan penting dalam perekonomian Indonesia ditengah ketidakpastian ekonomi global pada saat ini, dimana sepertiga dari perekonomian Indonesia adalah kontribusi dari BUMN sebagai pemulih ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” mengandung arti bahwa perusahaan BUMN adalah penggerak utama ekonomi negara.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, tercatat pendapatan yang dihasilkan oleh BUMN pada tahun 2018 senilai Rp2.339 triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu senilai Rp2.456 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp1.842 triliun dikarenakan adanya wabah covid 19 yang membuat segala aktivitas masyarakat menjadi terbatas, hal ini sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Lalu pada tahun 2021, kinerja keuangan BUMN kembali mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp1.983 triliun (Sasongko, 2020). Peningkatan pendapatan BUMN juga akan meningkatkan kontribusi BUMN kepada APBN sehingga pada tahun 2021 mencapai Rp362 triliun

(Ansari, 2022). Selama 10 tahun terakhir ini sumbangan yang diberikan BUMN kepada negara mencapai Rp4.013 triliun yang berasal dari Rp2.118 triliun pajak, Rp1.466 triliun dalam bentuk PNBPN, dan Rp429 triliun dividen. Direktur penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan mengatakan bahwa BUMN didorong untuk menjadi *agent of development* yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional dan penerimaan negara (Prambadi, 2022).

Dari kondisi pertumbuhan pendapatan BUMN dapat disimpulkan bahwa perusahaan BUMN menjadi harapan bagi pemerintah Indonesia dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik memilih perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2021 sebagai objek penelitian. Seluruh perusahaan BUMN *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangannya secara periodik, dan tentunya tidak terlepas dari kinerja dan nilai perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan yang akan menjadi faktor penentu investor dalam menanamkan modalnya. Dengan demikian, maka integritas pada laporan keuangan sangatlah penting agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan investasi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Juliana & Radita (2019) laporan keuangan adalah dokumen yang meringkas suatu informasi terkait kinerja perusahaan, salah satunya yaitu data keuangan yang dikumpulkan selama periode akuntansi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dan *stakeholder* dalam pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan yang akan digunakan untuk membuat suatu keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Pihak pengguna laporan keuangan yaitu kreditur, investor, pemerintah, karyawan dan para pengguna lainnya (Sinulingga et al., 2020). Maka dari itu, laporan keuangan patut disajikan secara

jujur, apa adanya dan sesuai dengan fakta yang ada agar para penggunanya tidak salah dalam mengambil suatu keputusan.

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan integritas sebagai suatu keadaan yang memuat sebuah kesatuan yang memiliki kemampuan untuk menyiarkan kejujuran. Bila dikaitkan dengan laporan keuangan berarti menyajikan suatu informasi laporan keuangan dengan pengungkapan penuh, transparan, dan tanpa ditutup-tutupi. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan secara jujur dan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya oleh suatu perusahaan tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Laporan keuangan dapat dikatakan berintegritas apabila informasi keuangan didalamnya adalah informasi yang benar dan jujur sehingga tidak menyesatkan penggunanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangannya dengan integritas yang tinggi, agar tidak merugikan seluruh pihak yang berkepentingan. Namun, pada kenyataannya untuk meraih integritas laporan keuangan merupakan hal yang tidak mudah. Terbukti karena masih ditemukannya beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya integritas pada laporan keuangan. Informasi yang diberikan oleh perusahaan yang melakukan manipulasi ini tidak benar adanya dan tidak layak untuk para pengguna laporan keuangan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian ini didasarkan oleh beberapa fenomena yang terjadi terkait dengan lemahnya integritas laporan keuangan yaitu kasus manipulasi laporan keuangan pada berbagai perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Salah satu diantaranya adalah kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada awal tahun 2019 yang terungkap melakukan ketidakjujuran pada laporan keuangan dengan salah saji pada pencatatan piutang dalam bentuk laba untuk pembukuan tahun 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan laba bersih senilai USD809,85 ribu atau Rp11,33 miliar, angka tersebut sangatlah meningkat drastis mengingat pada tahun 2017 Garuda Indonesia mengalami kerugian senilai USD216,5 juta. Meningkatnya

pendapatan tersebut terjadi karena dimasukkannya piutang PT Mahata Aero Teknologi sebesar USD239.940.000 kedalam pendapatan Garuda Indonesia (Hartomo, 2019). Oleh karena itu, dua komisaris Garuda Indonesia pun menolak untuk menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 dan menilai bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan PSAK.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi berupa denda serta kewajiban untuk menyajikan kembali laporan keuangan perusahaan tahun 2018 oleh Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporan keuangan terbarunya, Garuda Indonesia mengungkapkan kerugian senilai USD175,02 triliun setelah piutang PT Mahata Aero Teknologi tidak tercantum dalam pendapatan (Ridwan, 2019). Perusahaan yang kondisi keuangannya tidak baik maka cenderung akan melakukan kesalahan manajemen dan kecurangan yang berpengaruh kepada integritas laporan keuangannya (Sukanto & Widaryanti, 2018). Ketidak jujurannya dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan menurunnya kepercayaan pengguna informasi laporan keuangan dan menyesatkan pengguna laporan keuangan saat mengambil suatu keputusan. Berdasarkan kasus pelanggaran pada integritas laporan keuangan tentunya terdapat beberapa faktor penyebab, sehingga penulis menganggap masih layak untuk dilakukan penelitian lanjutan. Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yaitu *corporate governance* yang diukur dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan.

Menurut Darmayanti & Rochmi (2014) dalam Herada & Dwijayanti (2022) menyatakan bahwa integritas laporan keuangan dapat diukur menggunakan dengan dua proksi yaitu dengan konservatisme dan manajemen laba. Pada penelitian ini pengukuran integritas laporan keuangan menggunakan proksi konservatisme. Penulis menggunakan pengukuran konservatisme karena mempunyai ciri khas yaitu *understate* pada laporan keuangan yang risikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang *overstate*. Konservatisme lebih mengutamakan tingkat kehati-hatian dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti, sehingga penyajian informasi

dalam laporan keuangan terhindar dari kesalahan (Lubis et al., (2018). Konservatisme menghadapi ketidakpastian dimasa depan dengan mempercepat pengakuan biaya dan memperlambat pengakuan pendapatan, sehingga laporan keuangan akan menjadi lebih *reliable* dan informasi lebih berkualitas (Savitri, 2016:3). Prinsip konservatisme digunakan untuk mengukur integritas laporan keuangan karena menurut Zhou & Yang (2016) dalam Arista & Wahyudi (2018) menyatakan bahwa konservatisme secara intuitif berguna untuk memprediksi masa depan sesuai dengan tujuan laporan keuangan, sehingga menjadi faktor yang mampu meningkatkan integritas pada laporan keuangan. Proksi konservatisme juga selaras dengan akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan BUMN non-keuangan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan integritas laporan keuangan.

Integritas laporan keuangan berhubungan dengan teori keagenan. Teori agensi atau keagenan adalah teori yang menjelaskan terkait hubungan antara prinsipal dan agen yang berhubungan dengan suatu kontrak antara satu orang atau lebih yang menjadi pihak prinsipal untuk melaksanakan perintah kepada pihak agen (Jensen dan Mecking, 1976) dalam (Febrilyantri, 2020). Dalam hubungan ini dapat berpotensi terjadinya benturan kepentingan dikarenakan agen merupakan pihak yang lebih mengetahui terkait informasi internal perusahaan sehingga agen dapat melakukan tindakan diluar perjanjiannya dengan prinsipal demi kepentingan pribadi. Benturan kepentingan ini mampu diminimalisir dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang tepat guna menyelaraskan kepentingan seluruh pihak di suatu perusahaan (Solikhah & Hamid, 2017). *Corporate Governance* merupakan sistem yang mengelola hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan sehingga terciptanya keseimbangan dalam mengelola perusahaan (Atiningsih & Suparwati, 2018).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen (Fahmi & Nabila, 2020). Alasan peneliti memilih komisaris independen sebagai variabel x karena komisaris independen dalam suatu

perusahaan memiliki fungsi sebagai pengawas atau *monitoring* pada kebijakan manajemen, memberi masukan kepada manajemen, dan melindungi pihak diluar manajemen guna menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novianti & Isywardhana (2021) dan Nurdiniah & Pradika (2017) menyatakan bahwa komisaris independen secara positif mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Challen (2020) dan Srikandhi & Suryandari (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan sejumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga, atau institusi (Fikri & Suryani, 2020). Dengan keberadaan pemegang saham institusional akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen terkait dengan pelaporan keuangan. Alasan peneliti memilih kepemilikan institusional sebagai variabel x karena kepemilikan institusional mampu mengendalikan manajemen dengan proses pengawasan yang dilakukan secara efektif dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tamara & Kartika (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara positif mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Qonitin & Yudowati (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pelaporan keuangan secara independen (Pradika & Hoesada, 2019). Dalam hal pelaporan keuangan, komite audit bertanggung jawab atas audit laporan keuangan dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa manajemen telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku (Tamara & Kartika, 2021). Alasan peneliti memilih komite audit sebagai variabel x karena keberadaan komite audit dapat memastikan bahwa laporan keuangan telah mencakup informasi yang sesuai dengan faktanya dan

transparan sehingga meminimalisir risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan serta proses akuntansi perusahaan terpantau dengan baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Srikandhi & Suryandari (2020) dan Arista & Wahyudi (2018) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah & Hamid (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari jumlah aset, penjualan dan nilai pasar (Suzan & Wulan, 2022). Semakin besar ukuran perusahaan akan lebih menarik minat dan perhatian investor dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar akan berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur dan realistis (Juliana & Radita, 2019). Alasan peneliti memilih ukuran perusahaan sebagai variabel *x* karena ukuran perusahaan menentukan besarnya tuntutan yang diberikan oleh pemangku kepentingan terhadap perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur sehingga mendorong manajemen untuk menciptakan integritas pada laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febrilyantri (2020) dan Nurdiniah & Pradika (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Samrotun (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan inkosistensi dari berbagai hasil penelitian terdahulu, sehingga masih relevan untuk dilakukan penelitian ulang. Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk meneliti kembali beberapa variabel yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”**

1.3 Perumusan Masalah

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan dan sebagai alat informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan patut memiliki integritas yang tinggi agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. Namun faktanya untuk menciptakan integritas pada laporan adalah hal yang sulit, karena masih ditemukannya beberapa kasus perusahaan yang melakukan penyajian laporan keuangannya dengan tidak adanya integritas. Tindakan manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan perusahaan untuk menutupi kinerja keuangan perusahaan agar tetap terlihat baik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal dan juga membuat citra perusahaan menjadi buruk.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi pada beberapa hasil penelitian terhadap integritas laporan keuangan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya yang dipakai sebagai referensi dalam penelitian ini. Sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali. Faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang diukur dengan komisar independen, kepemilikan institusional, dan komite audit, serta ukuran perusahaan untuk dilakukan pengujian apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komisar independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan tingkat integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
2. Apakah komisar independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan

keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
5. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan tingkat integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan audit secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk pihak manapun. Manfaat yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan tambahan informasi bagi pembaca sehingga dapat menjadi referensi dalam pemahaman ilmu yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan informasi yang relevan untuk perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan serta mampu menyampaikan pengetahuan terkait unsur-unsur yang berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait dengan integritas laporan keuangan sehingga menjadi sumber informasi tambahan bagi investor dalam membuat suatu penilaian atau keputusan yang tepat.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai isi dari penelitian ini, yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori dari yang umum sampai khusus yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai berbagai penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, operasional variabel independen dan variabel dependen, populasi, sampel, dan menjelaskan tahapan pengumpulan data, jenis dan sumber data yang digunakan, serta analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasannya. Bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu menjelaskan hasil penelitian dan membahas atau analisis dari hasil penelitian mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga terdapat saran dan manfaat penelitian yang mampu dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, dan saran untuk pihak internal maupun eksternal yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.